

KEPEMIMPINAN TRANSFORMATIF DALAM PENGEMBANGAN PARIWISATA DI SUMATERA UTARA

Kariamansinaga

*Dosen Prodi Administrasi Publik Fisip Universitas Dharmawangsa
Email: kariamansinaga@dharmawangsa.ac.id*

RINGKASAN – Kepemimpinan adalah mutlak dalam menjamin pembangunan suatu wilayah dan keberlanjutannya. Kajian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tentang faktor kepemimpinan, konsep pengembangan wilayah, pemberdayaan masyarakat, dan kepemimpinan transformatif dalam pengembangan pariwisata di Sumatera Utara. Kajian ini menyimpulkan bahwa kepemimpinan transformatif dan pemberdayaan masyarakat akan melahirkan kebijakan yang promosyarakat dan kesejahteraanya yang tetap menjunjung kearifan lokal. Berdasarkan kajian ini diharapkan lahirnya kebijakan pengembangan pariwisata yang berfokus pada wisatawan, fasilitas wisata, transportasi dan atraksi wisata.

PENDAHULUAN

Faktor kepemimpinan sangat menentukan dalam pembangunan suatu wilayah sehingga memerlukan perhatian serius baik dari pemerintah, pihak swasta, dan masyarakat. Paradigma kepemimpinan atau mindset terhadap kepemimpinan memerlukan pemahaman yang lebih komprehensif untuk mendukung pembangunan yang dilaksanakan baik di taingkat daerah maupun nasional.

Pengembangan suatu wilayah memiliki keterkaitan erat dalam pelaksanaan berbagai bidang pembangunan yang dijalankan. Hal ini menuntut adanya konsep pengembangan suatu wilayah yang dapat saling mendukung antar sektor pembangunan. Unsur-unsur pokok dalam pengembangan suatu wilayah harus menjadi dasar dalam melakukan pengembangan sektor pembangunan di daerah.

Pengembangan sektor pembangunan di daerah memerlukan strategi yang tepat agar dapat mencapai tujuan yang diharapkan. Melalui strategi yang tepat dan dijalankan dengan baik akan memberikan kemudahan dalam upaya pencapaian tujuan. untuk mencapai tujuan.

KAJIAN TEORI

1. Faktor Kepemimpinan

Lahirnya kepemimpinan di Indonesia tidak terlepas dari proses politik yang berjalan di Indonesia sehingga sangat mempengaruhi pelaksanaan pemilu yang berkualitas dengan menerapkan asas pemilu. Namun dalam kenyataannya, kepemimpinan secara umum di Indonesia ternyata belum benar-benar berpihak kepada rakyat sehingga percepatan pembangunan berjalan lambat atau terkesan jalan ditempat. Bambang Soesatyo, Senin (17/02/2020) menyatakan bagaimana Indonesia yang sudah 75 tahun merdeka ini lumpuh, tidak bisa bergerak dari alam mimpi ke alam nyata. Pokok soalnya adalah, partai politik sebagai komponen penting negara ini di biayai "orang lain". Bahasa lain dibeli pemodal, harga satu partai semahal-mahalnya hanya Rp.1 Triliun. Jika partai politik telah dikuasai maka pasar dan sumber daya alam serta pemimpin mulai dari bupati, walikota, atau gubernur akan turut dikuasai.

Oleh karenanya kualitas pelaksanaan pemilu menjadi salah satu faktor yang menentukan untuk mencapai keberhasilan sektor pembangunan yang dijalankan di daerah. Diperlukan sosialisasi yang lebih intensif dan massif dalam menyampaikan kepada masyarakat agar memilih pemimpin baik di lembaga eksekutif dan lembaga legislatif secara jujur dan adil. Karena kepemimpinan yang akan terpilih merupakan orang-orang yang akan menentukan berhasil atau tidaknya pembangunan.

Berkaitan dengan kepemimpinan pada pembahasan penulis melihat berdasarkan kebijakan yang dijalankan yang merupakan kebijakan dominan dilakukan eksekutif dan legislatif. Pembahasan kepemimpinan tidak melihat gaya kepemimpinan yang biasa dilaksanakan berdasarkan gaya otokratis, gaya demokratis yang biasa menjadi pembahasan dasar kepemimpinan. Kemudian pembahasan penulis juga terkait dengan kepemimpinan secara nasional yang merupakan gambaran kepemimpinan yang juga terjadi di daerah.

Paradigma pembangunan yang dipahami masyarakat juga sangat mendukung kemajuan sektor pembangunan di daerah. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang lebih jelas tentang konsep kepemimpinan yang terkait dengan seluruh lapisan masyarakat. Pemahaman yang lebih

berkembang di masyarakat bahwa kepemimpinan hanya tertumpu kepada pihak eksekutif saja, oleh karena diperlukan pemahaman yang lebih terhadap lembaga legislatif sebagai lembaga yang menentukan kualitas kepemimpinan dalam mendukung pencapaian pelaksanaan pembangunan.

Kepemimpinan di daerah yang menentukan pelaksanaan pembangunan tidak hanya berada pada lembaga eksekutif namun juga sangat ditentukan oleh lembaga legislatif, lembaga yudikatif dan lembaga-lembaga terkait lainnya termasuk lembaga masyarakat yang akan disampaikan pada bagian selanjutnya. Hal ini merupakan pergeseran paradigma atau mindset tentang tanggungjawab dalam kehidupan bernegara dan dalam konteks pemerintahan di daerah. Pemahaman masyarakat yang selama ini dominan dipahami masyarakat harus bergeser kepada lembaga-lembaga negara dan lembaga terkait serta pihak swasta maupun masyarakat.

Beberapa hal di atas merupakan bukti pentingnya transformasi kepemimpinan dalam mendukung sektor pembangunan pariwisata di Sumatera Utara. Transformasi dalam konteks pemerintahan daerah dalam pelaksanaan pembangunan di berbagai sektor tidak terlepas dari pemahaman masyarakat tentang pentingnya kepemimpinan. Sumber daya manusia yang menduduki jabatan-jabatan di lembaga-lembaga negara sangat diharapkan orang-orang yang benar-benar memiliki kompetensi sehingga akan menghasilkan kinerja atau produktivitas yang tinggi.

Aspek politik yang disampaikan penulis juga merupakan respon terhadap pemilu yang akan dilaksanakan pada 9 Desember 2020 untuk menghasilkan kepemimpinan yang berkualitas dan mengantarkan pada pencapaian kesejahteraan masyarakat luas. Kepemimpinan-kepemimpinan yang telah berjalan sebelumnya juga menjadi pembelajaran bagi setiap masyarakat untuk melihat kualitas kepemimpinan yang dilaksanakan. Kebijakan-kebijakan yang telah dilakukan harus menjadi perhatian masyarakat dalam mengatasi persoalan-persoalan pembangunan di daerah. Oleh karenanya, kepemimpinan menjadi penting untuk dievaluasi atas kebijakan-kebijakan yang dilakukannya dalam mengatasi masalah yang menyangkut kepentingan masyarakat (Murray:1984). Pengembangan pariwisata dapat menjadi tolak

ukur keberhasilan kepemimpinan kepala daerah sesuai dengan potensi wisata yang dimiliki.

Selama ini kepemimpinan secara politik masih menunjukkan gaya kepemimpinan “agresif manipulatif “ yang lebih memberikan janji-janji politik namun tidak sesuai dengan realitas. Pelaksanaan pemilu telah menghasilkan ketidakpercayaan antara pemimpin dan masyarakat karena hubungan yang terbangun tidak berdasarkan hubungan relasional tetapi lebih kepada kepentingan materi (Mc Cracken:2018:26).

Kepemimpinan pada level nasional dan daerah merupakan penentuan bentuk pengembangan pariwisata yang dilakukan. Selanjutnya dapat dilihat berdasarkan kebijakan-kebijakan yang dilakukan pemerintah daerah dengan lembaga terkait yang dapat di lihat sejak proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi.

Pemilu yang dilaksanakan diharapkan menghasilkan pemimpin yang terpilih secara demokratis dalam arti yang luas sehingga akan menghasilkan pemimpin yang terbebas dari beban proses politik dan memiliki kemampuan melalui kebijakan-kebijakan strategis yang dijalkannya. Pemimpin yang diharapkan dalam mengembangkan pariwisata merupakan pemimpin yang tidak memiliki beban politik sehingga dapat leluasa dalam mengambil kebijakan dalam menjalankan kepemimpinannya di daerah.(Sinaga Kariaman 2016; 10)

2. Konsep Pengembangan Wilayah

Pengembangan pariwisata di Sumatera Utara merupakan bagian yang integral dengan pengembangan pariwisata nasional. Dalam hal ini konsep dasar pengembangan pariwisata harus menjadi pedoman bagi setiap daerah dalam menjalankan pengembangan pariwisata. Pengembangan pariwisata yang dilakukan di daerah Sumatera Utara masih lebih diprioritaskan kepada kelas menengah ke atas. Para pemodal besar masih sangat dominan dan diutamakan sehingga kurang memberikan dampak yang luas bagi masyarakat.

Pengembangan pariwisata yang memiliki posisi strategi sebaiknya memberikan ruang yang luas kepada masyarakat menengah ke bawah agar dapat meningkatkan kesejahteraan secara signifikan. Pengembangan pariwisata

di Sumatera Utara belum memberikan kesempatan yang luas bagi masyarakat menengah ke bawah. Pengembangan investasi di pesisir pantai cermin menunjukkan penguasaan pemodal besar sedangkan masyarakat disekitar umumnya hanya sebagai pedagang keliling untuk menjual makanan, hasil laut dan lainnya secara berjalan-atau dengan motor tanpa memiliki tempat untuk dapat berdagang secara lebih baik. Demikian pula dengan pedagang mangga yang berada di pinggiran jalan lintas kota wisata parapat yang selalu menjadi bahan cemoohan karena dianggap menjual yang terlalu mahal atau keluhan lainnya, namun apabila di telusuri sebenarnya para pedagang tersebut tidak memiliki tempat berdagang yang layak dan strategis untuk menjual dagangannya.

Beberapa tempat wisata dan terkait pengembangan wisata di Sumatera Utara yang masih memprioritaskan pemodal besar antara lain pembangunan Taman Simalem Resort serta pembangunan jalan tol yang belum sesuai dalam memberikan kesempatan berusaha untuk pedagang kecil dan menengah. Pembangunan terkait dengan pengembangan wilayah juga terkait dengan pengembangan pariwisata seperti pembangunan jalan tol yang harus tetap memperhatikan kepentingan masyarakat luas agar mendapatkan akses untuk memperoleh dampak dalam peningkatan kesejahteraan.

Bagaimana peranan lembaga-lembaga negara yang memimpin pelaksanaan pembangunan di daerah terutama lembaga eksekutif dan lembaga legislatif dalam memperjuangkan masyarakat ekonomi menengah ke bawah untuk dapat meningkatkan kesejahteraannya sebagaimana konsep pengembangan wilayah?.

Pengembangan pariwisata dilaksanakan di tingkat nasional maupun tingkat regional yang tidak terlepas dari konsep pengembangan suatu wilayah sebagai kerangka pembangunan nasional yang harus mengutamakan kepentingan masyarakat luas. Nugroho (2004) menyatakan pengembangan suatu wilayah dilakukan untuk melindungi ekonomi masyarakat terutama masyarakat lemah. Hal ini dilakukan untuk perekonomian masyarakat agar melahirkan mekanisme pasar yang efisien dan sustainability, sebagai

pembangunan wilayah dalam kerangka pembangunan yg menyeluruh termasuk aspek kelembagaan.

Berdasarkan uraian di atas dapat dilihat adanya keterkaitan yang erat antara pengembangan suatu wilayah dengan pengembangan sektor wisata. Termasuk dalam konsep pelaksanaannya yang harus menjalankan konsep pengembangan wilayah baik secara regional maupun nasional.

Pengembangan pariwisata di Indonesia dan khususnya di Sumatera Utara seharusnya dapat dimanfaatkan untuk mengurangi jumlah pengangguran. Jumlah penduduk Sumatera Utara Tahun 2018 14,5 Juta sedangkan angka Penganggurannya tahun 2018 berjumlah 396 ribu jiwa. Hal ini sangat perlu dimanfaatkan masing-masing pemerintah daerah untuk diarahkan dalam mendukung pengembangan pariwisata. (Sumber BPS Sumatera Utara).

Dalam melakukan pengembangan wilayah diperlukan perencanaan yang jelas tentang gambaran kondisi yang ada untuk melakukan penyesuaian melalui perencanaan pada masa akan datang. Perencanaan merupakan cara berpikir untuk melakukan penyesuaian pada masa yang akan datang dengan perkiraan-perkiraan yang sistematis dan rasional. Sehingga perencanaan menjadi keharusan untuk dapat berhasil setelah melakukan perkiraan apa yang harus dilakukan pada masa yang akan datang. Perkiraan yang dimaksud sebagai pengetahuan atas situasi yang dialami pada saat ini untuk menetapkan kebijakan-kebijakan (Friedman:1992).

Pengembangan wilayah pada dasarnya mempunyai arti peningkatan nilai manfaat wilayah bagi masyarakat suatu wilayah tertentu yang mampu menampung lebih banyak penghuni, dengan tingkat kesejahteraan masyarakat yang rata-rata membaik, disamping menunjukkan lebih banyak sarana/prasarana, barang atau jasa yang tersedia dan kegiatan usaha-usaha masyarakat yang meningkat, baik dalam arti jenis, intensitas, pelayanan maupun kualitasnya (Sirojuzilam dan Bahri, 2014).

Yoeti (1997) mengemukakan pengembangan pariwisata perlu memperhatikan beberapa aspek yang yaitu:

- a. Wisatawan (*tourist*); harus diketahui karakteristik dari wisatawan, dari negara mana mereka datang, usia, hobi, dan pada musim apa mereka melakukan perjalanan.

- b. Transportasi; harus dilakukan penelitian bagaimana fasilitas transportasi yang tersedia untuk membawa wisatawan ke daerah tujuan wisata yang dituju.
- c. Atraksi/obyek wisata; atraksi dan objek wisata yang akan dijual, apakah memenuhi tiga syarat seperti: a) Apa yang dapat dilihat (*something to see*), b) Apa yang dapat dilakukan (*something to do*), c) Apa yang dapat dibeli (*something to buy*).
- d. Fasilitas pelayanan; fasilitas apa saja yang tersedia di DTW tersebut, bagaimana akomodasi perhotelan yang ada, restaurant, pelayanan umum seperti bank/money changers, kantor pos, telepon/teleks yang ada di DTW tersebut.
- e. Informasi dan promosi; diperlukan publikasi atau promosi, kapan iklan dipasang, kemana leaflets/ brosur disebarakan sehingga calon wisatawan mengetahui tiap paket wisata dan wisatawan cepat mengambil keputusan pariwisata di wilayahnya dan harus menjalankan kebijakan yang paling menguntungkan bagi daerah dan wilayahnya, karena fungsi dan tugas dari organisasi pariwisata pada umumnya: a) Berusaha memberikan kepuasan kepada wisatawan dengan segala fasilitas dan potensi yang dimilikinya. b) Melakukan koordinasi di antara bermacam-macam usaha, lembaga, instansi dan jawatan yang ada dan bertujuan untuk mengembangkan industri pariwisata. c) Mengusahakan memasyarakatkan pengertian pariwisata pada masyarakat di objek wisata, sehingga mereka mengetahui untung dan ruginya bila pariwisata dikembangkan sebagai suatu industri. d) Mengadakan program riset yang bertujuan untuk memperbaiki produk wisata dan pengembangan produk-produk baru guna dapat menguasai pasaran di waktu yang akan datang.

3. Pemberdayaan Masyarakat

Untuk mendukung keberhasilan kepemimpinan yang mensejahterakan masyarakat maka diperlukan strategi pembangunan yang memberdayakan masyarakat. Cina Y C Yen (1925) dalam Moeljarto (1987) menyatakan keberhasilan pembangunan adalah kepemimpinan yang memberdayakan masyarakat. Hal ini sejalan dengan konsep pembangunan yang memperhatikan

pembangunan berkelanjutan (sustainability) bukan mengutamakan kepentingan individu atau kelompok.

Pemberdayaan masyarakat memerlukan pemahaman yang luas untuk mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Diperlukan usaha yang bersifat kompleks sehingga berbagai bidang yang menjadi kebutuhan dari masyarakat dapat merasakan manfaatnya. Menurut Ndraha dalam I Nyoman Sumaryadi (2005: 145) pemberdayaan meliputi: a.pemberdayaan politik b.pemberdayaan ekonomi c.pemberdayaan sosial budaya dan d.pemberdayaan lingkungan. Sesuai dengan aspek-aspek pemberdayaan masyarakat di atas maka perlu diketahui tantangan-tantangan pemimpin suatu daerah yang mengakibatkan perlambatan dalam pengembangan objek wisata.

Pemimpin yang diharapkan dapat memberdayakan masyarakat memiliki nilai strategis kepemimpinan yang bersifat dinamis sesuai dengan hak dan kewajiban yang diembannya.(Soedjono Soekanto, 2012:243). Untuk mendukung kepemimpinan yang berbasis pada pemberdayaan masyarakat maka diperlukan: a.Kepemimpinan yang melayani, pelayanan kepada masyarakat dilakukan sesuai dengan ruang lingkup kepemimpinan seseorang. Pelayanan publik merupakan bentuk pelayanan baik dalam barang publik maupun jasa publik yang pada prinsipnya menjadi tanggungjawab yang dilaksanakan instansi pemerintahan di pusat, di daerah dan di lingkungan Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam pelaksanaan peraturan perundang-undangan, (Kep.Menpan No.63 Tahun 2003).b.Pemimpin yang dapat memberikan kesejahteraan kepada orang-orang yang dipimpinya.c..Pemimpin yang tegas dan berkarakter, tegas dalam arti tidak membedakan dalam melakukan tindakan atau sanksi kepada yang melakukan kesalahan dan memberikan apresiasi terhadap orang-orang yang telah melakukan prestasi dalam menjalankan tugasnya. d.Proses lahirnya pemimpin memerlukan proses yang baik dalam proses pemilihannya sehingga dalam menjalankan tugas secara bertanggungjawab.

Sejalan dengan pemberdayaan masyarakat, maka pengembangan pariwisata sebaiknya tidak hanya berorientasi pada proyek-proyek

pembangunan hotel, apartemen, atau proyek wisata yang besar namun tetap harus mengupayakan, memfasilitasi sesuai dengan konsep pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat luas.

Kebijakan publik memiliki tugas paling mendasar agar masyarakat dapat hidup, tumbuh, dan berkembang yaitu tugas pelayanan, tugas pembangunan, dan tugas pemberdayaan. Ketiga tugas ini dilaksanakan oleh organisasi-organisasi yang memang dilahirkan untuk mengemban tugas tersebut. Secara terperinci pembagian tugas tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Tugas Pelayanan (Publik) adalah tugas memberikan pelayanan kepada umum tanpa membeda-bedakan dan diberikan secara cuma-cuma atau dengan biaya sedemikian rupa sehingga kelompok paling tidak mampu pun mampu menjangkaunya. Tugas ini diemban oleh negara yang dilaksanakan melalui salah satu lengannya, yaitu lengan eksekutif (pelaksana pemerintah).
- b. Tugas Pembangunan adalah tugas untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dari masyarakat. Pelaksanaan tugas pembangunan cenderung bersifat *top down* sehingga pelaksanaannya sangat bernuansa politis.
- c. Tugas Pemberdayaan berdasarkan pada faktor endogen dan faktor eksogen yang ada di masyarakat. Kebijakan pemerintah merupakan faktor eksogen yang harus dijalankan sedangkan faktor endogen merupakan kesiapan dari masyarakat itu sendiri dalam menjalankan suatu program pembangunan.

4. Kepemimpinan Transformatif

Penggunaan teknologi informasi dalam kaitan dengan pengembangan wilayah berbasis pemberdayaan masyarakat adalah dengan transparansi pengembangan pariwisata yang dilakukan di tingkat eksekutif dan legislatif. Masyarakat luas perlu mengetahui rancangan-rancangan project yang akan dilakukan pemerintah daerah maupun project yang berskala nasional maupun internasional. Meskipun perekonomian secara nasional dan daerah mengalami penurunan bukan berarti memasukkan pemodal-pemodal asing menjadi satu-satunya solusi karena pemberdayaan usaha masyarakat juga dapat menjadi penopang perekonomian secara nasional dan daerah sebagaimana kekuatan usaha kecil dan masyarakat menengah berhasil menghadapi krisis yang terjadi pada 1998.

Masyarakat memerlukan akses yang untuk terlibat dalam pelaksanaan pengembangan pariwisata sehingga berdampak luas terhadap kesejahteraan masyarakat. Sejalan dengan perkembangan teknologi informasi, maka pengembangan pariwisata berbasis teknologi informasi diarahkan untuk mendukung pada pemberdayaan masyarakat secara luas. Inpres No.3 Tahun 2003 menyatakan: pemanfaatan teknologi informasi dilakukan untuk mendukung proses transformasi (E-Government) guna memfasilitasi kegiatan masyarakat dan bisnis menuju masyarakat yang berbasis pengetahuan.

Kepemimpinan yang ada saat ini menuntut kesiapan penguasaan teknologi informasi untuk mendukung efektifitas dan efisiensi dalam pengembangan pariwisata. Dalam konteks kebijakan publik, maka pengembangan objek wisata saat ini merupakan andalan dalam peningkatan perekonomian nasional yang memerlukan dukungan yang kuat termasuk aspek kepemimpinan yang transformatif (Murray:1984).

Berkaitan dengan transformasi kepemimpinan terdapat beberapa fungsi pokok kepemimpinan menurut Permadi (2010) adalah: fungsi instruksi, fungsi konsultasi, fungsi partisipasi, fungsi delegasi, dan fungsi pengendalian. Dalam penerapannya pemimpin berada pada posisi yang diharapkan dapat menggerakkan bawahan, dapat melakukan perbaikan-perbaikan melalui konsultasi terhadap bawahan, kepemimpinan yang dapat membedakan tugas yang harus di bagi dengan orang lain, dan kepemimpinan yang mampu mengarahkan pada pencapaian tujuannya.

SIMPULAN

1. Kepemimpinan dalam pengembangan wilayah akan memberikan dampak kesejahteraan bagi masyarakat luas jika didukung oleh kepemimpinan yang dapat memfasilitasi perekonomian masyarakat menengah ke bawah.
2. Solusi dalam pengembangan wilayah untuk pembangunan sektor wisata harus tetap mengedepankan masyarakat luas melalui pemberdayaan masyarakat berbasis kearifan lokal.
3. Transformasi kepemimpinan yang dimaksud dalam pengembangan pariwisata adalah perubahan yang dilakukan baik secara nasional maupun daerah dengan

memprioritaskan kepentingan kesejahteraan umum dan tidak hanya sebagai wacana.

4. Kepemimpinan dalam pengembangan pariwisata yang transformasional menyangkut pada kebijakan wisatawan, fasilitas wisata, transportasi dan atraksi wisata.

DAFTAR PUSTAKA

- Soejono Soekanto. 2012. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: CV Rajawali Zakaria.
- Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 63 Tahun 2003 Tentang Pengertian Pelayanan Publik
- Kemenristekdikti RI. 2018. *Pendidikan Antikorupsi*. Edisi Revisi, Jakarta, Sekretariat Jenderal Ristekdikti.
- Nugroho, Iwan dan Rokhmin Dahuri. 2012. *Pembangunan Wilayah; Perspektif Ekonomi, Sosial, dan Lingkungan*. LP3ES. Jakarta.
- Waspada.id/opini/ada-j (<https://waspada.id/opini/ada-jahat-biarada-jihad>)
- Sinaga, Kariamam, Efektivitas Penegakan Penyelenggaraan Pemilu dalam Penegakan Integritas Pemilukada, Jurnal Publico, Jurnal Ilmu Administrasi, Vol.1,No.1 , IAPA Sumut, Medan
- Biro Pusat Statistik Sumatera Utara, Angka Pengangguran Provinsi Sumatera Utara.